

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abas, I., & Luki. (2022). *Analisis Yuridis Peran Kurator Dalam Kepailitan Guna Melindungi Hak Para Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.
- Andani, D., Murjiyanto, R., & Sudiyana. (2024). *Pengajuan Tagihan Kreditor Terhadap Debitor Setelah Lewat Waktu Pencocokan Putang. Diversi Jurnal Hukum*,
- Asikin, Z. (2000). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafiindo Persada.
- Aprita, S., & Qosim, S. (2022). *Optimalisasi Wewenang dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Kepailitan di Indonesia. Jurnal Ius Constituendum*,
- Arimba, C. I. (2023). *Tanggung Jawab Hakim Pengawas Terhadap Harta Pailit. Begawan Abioso*,
- Elyta Ras Ginting, S. (2018). *Hukum kepailitan: Teori Kepailitan*,. Sinar Grafika.
- Hartini. R. (2020). *Hukum Kepailitan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University.
- Rochmawanto, M. (2015). *Upaya Hukum Dalam Pekara Kepailitan. Jurnal Independent*, 9.
- Sastrawidjaja, M. S. (2010). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: PT. Alumni.
- Sjahdeini, S. R. (2009). *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Pustaka Utama Grafiti.
- Subhan., M. H. (2008). *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan). Cet. I.* . Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- Subhan., M. H. (2009). *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan) Cet. II*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group.

Tunggal, H. S. (2005). *UU K-PKPU Tentang Kepailitan dan Kewajiban Membayar Hutang*. Jakarta: Harvindo.

Yuhelson. (2014). *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Gorontalo: Ideas Publising.

Zulfikli, S., & Noor, T. (2022). *Buku Ajar Hukum Kepailitan*. Unpri Press.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER).

Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. 63/Pdt.Sus/GLL/2023/PN Niaga SBY
Jo. No.40/Pdt.Sus/2023/PN Niaga SBY.

Jurnal

Alfitria, S. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Mantan Direktur Perusahaan Yang Tagihannya Ditolak Dalam Pencocokan Piutang*. *Jurnal Vol 9*, 166.

Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS.

Barnini, A., & Artaji, N. (2021). *Kedudukan Kreditor yang Tidak Terdaftar Pada Putusan Perdamaian PKPU Dalam Menggunakan Permohonan Pernyataan Pailit*. *Jurnal Vol 4*.

Hadibroto., G. O. (2023). *Upaya Hukum Dalam Perkara Kepailitan*. *Jurnal Multilingual*, 7.

Lestari, P. A. (2013). *Praktek Eksekutorial Separatis Kreditor Terhadap Debitor Yang Dinyatakan Pailit Pada Perbankan Di Indonesia*. *Jurnal Lex Privatum*, 1, 182.

Niffari, H. (2012). *Akibat Hukum Bagi Kreditor Yang Tidak Mendaftarkan Piutangnya Kepada Kurator Untuk Dilakukan Pencocokan Piutang Pada Kasus Putusan Mahkamah Agung No.192K/PDT.SUS/2011*. Skripsi.

Nugroho, L. D. (2016). *Itikad Baik Sebagai Tolak Ukur Perbuatan Debitor Dalam Kepailitan*. 264.

Puteri, S. T. (2023). *Tinjauan Hukum Terhadap Kedudukan Kreditor Yang Tidak Terdaftar Namun Tercatat Dalam Piutang Perseroan Berdasarkan PKPU (Studi Putusan Homologasi No. 54/ Pdt.Sus-PKPU/202/PN.Niaga Jkt.Pst. Journa of Social Comunnity*.

Putra, N. R., Fachruzori, A., Suryanti, N., & Yuanitasari, D. (2023). *PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK PADA PENGALIHAN HAK ATAS TANAH TERHADAP HARTA DEBITOR PAILIT : APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF GOOD FAITH IN THE TRANSFER OF LAND RIGHTS TO THE PROPERTY OF A BANKRUPTCY DEBTOR*. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 4(2), 99.

Putri, S. U. (2015). *Kepastian Hukum Bagi Kreditor Konkuren Pasa Babbington Development Limites Terhadap PT. Polysindo Eka Perkasa TBK Berdasarkan Prinsip Pari Passu Pro Rata Parte*. *Skripsi*, 1.

Sitorus, S. (2018). *Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata*. *Jurnal Hikmah*, 63.

Tumiwa, R. J., Rumate, V. A., & Rotinulu, D. C. (2019). *Analisis Efektivitas Kredit Konstruksi (Kink-Kontraktor) PT. Bank Sulutago Terhadap Pembangunan Infrastruktur Provinsi Sulawesi Utara*. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 91.

Skripsi/Tesis

Hutabarat, I. R. (2022). *Analisis Yuridis Permohonan Pailit PT. Bina Karya Sarana Oleh Kreditor (Studi Putusan No. 6/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Medan)*. *(Skripsi)*.

Mudzakir, M. A. (2023). *Tugas dan Peran Kurator Dalam Proses Kepailitan Studi Kasus dalam Perkara No. 11/Pdt.Sus-Pailit/PN.Smg Jo No. 11/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Smg*. *(Skripsi)*.

Prabowo, M. (t.t.). *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Yang Tagihannya Ditolak Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. *(Tesis)*.

Riwanto, N. (2020). *Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Pengawasan Harta Pailit*. *(Tesis)*.

Website

Amira. (2024, November 22). *Tinjauan Hukum kepailitan*. Retrieved from digilib.unila.ac.i

Ariansyah, M. F. (2024, 4 Juli). *Mengenal Gugatan Lain-Lain Dalam Pekara Kepailitan*. Diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumut/baca-artikel/17062/Mengenal-Gugatan-Lain-Lain-Dalam-Perkara-Kepailitan.html>